OMBUDSMAN SULSEL TEKANKAN PENTINGNYA STANDAR PELAYANAN DALAM TRANSFORMASI BRMP ANEKA UMBI

Jum'at, 20 November 2026 - Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Selatan

PAREPARE - Ombudsman RI menilai transformasi kelembagaan di lingkungan Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) Tanaman Aneka Umbi perlu diikuti dengan pembenahan standar pelayanan publik. Transformasi organisasi tidak cukup dengan mengubah struktur dan tugas, tetapi juga harus memastikan masyarakat memperoleh pelayanan yang jelas, transparan, dan mudah diakses.

Hal tersebut disampaikan Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulawesi Selatan, Dr. Ismu Iskandar, saat menjadi narasumber dalam Forum Konsultasi Publik yang diselenggarakan BRMP Tanaman Aneka Umbi di Aula Universitas Muhammadiyah Parepare, Rabu (18/11/2026).

Dalam pemaparan bertajuk "Standar Pelayanan dalam Pelayanan Publik yang Mensejahterakan", Ismu mengingatkan bahwa transformasi birokrasi menuntut perubahan cara pandang.

"Pelayanan publik adalah wajah nyata kehadiran negara. Transformasi birokrasi menuntut perubahan orientasi, dari sekadar melaksanakan tugas menjadi menghasilkan manfaat bagi masyarakat. Inovasi dan modernisasi pertanian juga harus diikuti dengan modernisasi tata kelola pelayanan," jelas Ismu.

Menurutnya, kemajuan teknologi, peningkatan efisiensi produksi, hingga pengembangan hasil pertanian tidak akan memberikan manfaat optimal apabila masyarakat masih menghadapi ketidakjelasan prosedur, persyaratan, biaya, maupun waktu pelayanan.

Ismu menjelaskan bahwa perubahan tugas dan fungsi kelembagaan membawa konsekuensi terhadap jenis layanan yang diberikan kepada masyarakat. BRMP Tanaman Aneka Umbi memiliki peran penting dalam mendukung transformasi sektor pertanian melalui inovasi, pengembangan teknologi, dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Peran tersebut, kata dia, perlu didukung dengan jenis pelayanan yang jelas dan dapat diakses masyarakat.

Kepastian layanan penting agar masyarakat, khususnya petani dan kelompok pengguna lainnya, mengetahui hak yang dapat diperoleh, persyaratan yang harus dipenuhi, serta mekanisme untuk mengakses layanan tersebut.

Ismu menilai standar pelayanan yang tidak diterapkan secara konsisten dapat menimbulkan ketidakpastian, membuka peluang penyalahgunaan kewenangan, menurunkan kepercayaan masyarakat, hingga memicu maladministrasi. Karena itu, pencegahan harus dilakukan sejak awal melalui sistem pelayanan yang tertata, bukan sekadar menunggu laporan ketika permasalahan muncul.

"Standar pelayanan bukan sekadar dokumen atau janji tertulis. Itu merupakan komitmen yang harus dibuktikan melalui tindakan, sehingga masyarakat benar-benar mendapatkan pelayanan yang pasti, adil, dan berkualitas," tegasnya.

Melalui forum konsultasi publik ini, Ombudsman Sulsel mendorong BRMP Tanaman Aneka Umbi menjadikan transformasi kelembagaan sebagai momentum memperkuat kualitas pelayanan. Keberhasilan perubahan organisasi pada akhirnya tidak hanya diukur dari struktur baru maupun inovasi teknologi, tetapi dari kemudahan, kepastian, dan manfaat yang dirasakan masyarakat. (*)